

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

2.1.1.1 Definisi Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

Sebagai sebuah akronim, Diklat dibangun dari dua konsep, yakni Pendidikan dan Pelatihan. Garavan dalam Nugraha (2020, hlm 21) mendefinisikan pendidikan sebagai proses atau serangkaian kegiatan yang bertujuan memungkinkan seseorang berasimilasi dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan pemahaman yang tidak hanya terkait dengan bidang kegiatan yang sempit, tetapi dapat memungkinkan masalah rumit yang luas untuk didefinisikan, dianalisis dan diselesaikan. Yuda B Tangkilisan dalam Wiryopranoto (2017, hlm 185) mengutarakan Pendidikan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan ataupun kemajuan umat manusia. Kesadaran dan kemampuan seseorang dalam menjalankan kehidupannya dapat diperoleh melalui proses pendidikan. Maka pendidikan tentu jelas mempunyai peran dalam terjadinya perubahan sosial. Diterangkan oleh tokoh Pendidikan Ki hajar Dewantara (2017, hlm 204) bahwa pada saatnya, pendidikan akan membawa peserta didik kepada kemerdekaan yang lebih utuh. Maka, pendidikan adalah sebagai bagian yang integral dari proses memerdekakan Indonesia. Ki hajar dewantara juga mengklasifikasikan pendidikan dengan 3 bagian; pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal. Yang menjadi sorotan pada penelitian ini adalah tentang pendidikan dan pelatihan dimana diklat merupakan ranah dari pada pendidikan nonformal.

Saleh (2020, hlm 9-10) mengatakan Pendidikan Nonformal merupakan bentuk dari perkembangan penyelenggaraan pendidikan secara luas, bahwa pendidikan bukan hanya kegiatan yang terorganisir di sekolah, tetapi juga diluar sekolah, karena pada hakikatnya pendidikan yang sebenarnya adalah kehidupan, dan sekolah hanyalah bagian kecil yang terbatas oleh jenjang umur dan disiplin. Dikatakan Nuranida dalam Nita (2022, hlm 22) Pendidikan Nonformal merupakan

sebuah ranah pendidikan yang segala sistem manajemen dan pelaksanaannya diluar kaidah formal, pendidikan ini dibutuhkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan belajar, menambah pengetahuan dan keterampilan baik yang sebelumnya telah ia dapatkan dalam pendidikan formal maupun yang lainnya. Berlangsung dengan waktu yang relatif singkat, tempat yang fleksibel, dan menggunakan metode pembelajaran orang dewasa. Pada tujuannya, pendidikan nonformal mengharapkan adanya perubahan untuk kesejahteraan hidup lulusan yang bisa dilihat dari perolehan individu dalam bekerja atau berwirausaha, memperoleh peningkatan pendapatan, pendidikan dan penampilan dirinya, kesehatan, dan juga bagaimana individu tersebut bisa mengamalkan hasil belajar yang telah ia peroleh dan dirasakan manfaatnya, kemudian adanya peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial atau pembangunan masyarakat baik itu berwujud partisipasi buah pikiran, tenaga, harta benda, ataupun dana, Suhaenah (2016, hlm 93).

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 9 tentang ketenagakerjaan, pelatihan ialah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Dijelaskan Herwina (2021, hlm 1) pelatihan atau *training* amat diperlukan sebagai salah satu tongkat untuk meningkatkan keahlian hingga menghasilkan sumber daya manusia yang terampil. Kemudian menurut Selong (2019, hlm 8) pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses yang akan menghasilkan suatu perubahan perilaku dari target diklat.

Dari kumpulan definisi mengenai pendidikan dan pelatihan, bisa dibilang pelatihan masih bagian dari pendidikan. Pendidikan menyampaikan kepada individu tentang ilmu-ilmu yang harus mereka punya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pelatihan yang bersifat spesifik, praktis, dan segera. Spesifik berarti pelatihan berhubungan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan, praktis dan segera berarti yang sudah dilatihkan dapat dipraktikkan. Pendidikan dan

pelatihan berada pada ruang dimensi yang berbeda, namun saling beririsan karena mengarah kepada perbaikan kompetensi dan tetap bermuara pada kinerja. Nugraha (2020, hlm 22) menerangkan bahwa pelatihan ataupun pendidikan, merupakan investasi bagi seseorang maupun organisasi, untuk bersedia belajar sesuai dengan kebutuhannya baik dalam kerangka jangka pendek (temporer) yaitu yang berkenaan langsung dengan pekerjaan, ataupun jangka panjang yang berhubungan dengan pengembangan dirinya sepanjang hayat.

2.1.1.2 Tujuan DIKLAT

Sumber daya manusia yang ada di dalam tubuh Satlinmas mesti dikembangkan agar bisa sesuai dengan pekerjaan dan organisasinya. Sebagai salah satu upaya pengembangan tersebut bisa dicapai melalui pendidikan dan pelatihan yang kemudian akrab disebut dengan DIKLAT. Selong (2019, hlm 8) mengatakan pendidikan dan pelatihan (diklat) akan menjadi suatu proses yang dapat menghasilkan suatu perubahan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan pelatihan, diharapkan dapat memperbaiki tingkah laku pada partisipan pelatihan yang sebenarnya merupakan anggota suatu organisasi dan juga perbaikan terhadap organisasinya itu sendiri agar menjadi lebih efektif. Apabila pelatihan tertuju pada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS), tujuan pelatihan adalah agar anggota Satlinmas tersebut menjadi lebih baik pengetahuan, keterampilan dan sikapnya, selanjutnya Satuan Perlindungan Masyarakat menjadi lebih baik pula, misalnya lebih produktif dan efektif dalam melaksanakan program-programnya serta mencapai tujuannya. Adapun selain keterampilan, Sudiapermana (2021, hlm 168) mengatakan yang berkaitan dengan pekerjaan, tak kalah penting pengembangan kemampuan yang lainnya untuk didukung seperti *problem solving*, berpikir kritis, kreatif, *team work*, juga kemampuan untuk terus belajar dan siap menghadapi perubahan yang cepat. Dengan itu pelatihan berkenaan dengan bidang Satlinmas ini akan mengubah kebiasaan-kebiasaan anggota yang kurang optimal, lalu mengubah sikap serta memperbaharui keterampilan anggota Satlinmas itu sendiri dalam menyelesaikan tugasnya sehari-hari.

2.1.1.3 Prinsip dan Konsep DIKLAT

Diklat menjadi sesuatu yang wajib diselenggarakan sebagai investasi sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi. Dalam prinsipnya, sistem pendidikan yang berbasis kompetensi ini memiliki arah untuk memperkuat fungsi-fungsi pekerja yang harus berjalan sesuai dengan standarnya. Iswan (2021, hlm 24) merinci prinsip Diklat diantaranya adalah sebagai pengembangan keterampilan dan pembentukan etos kerja yang bermutu. Pada pendidikan dan pelatihan Satlinmas yang dilakukan oleh Desa Tawangbanteng, arahnya adalah untuk mengembalikan marwah Satlinmas ke yang seharusnya dengan memberikan mereka bekal untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi yang semestinya sehingga akan didapatkan pengakuan juga kepercayaan dari masyarakat untuk Satlinmas sebagai sebuah pekerjaan. Nantinya, setiap sistem pelatihan yang sudah dilakukan ini harus meraih makna dengan mengintegrasikannya dengan pengoptimalan SDM dalam organisasi tersebut dalam hal ini Satuan Linmas. Ini juga akan menjadi bukti bahwa adanya strategi peningkatan ini memang mendukung strategi personel lainnya. Misalnya integrasi tentang penilaian kinerja, atau sistem pembayaran gaji/upah.

Knowles mengatakan bahwa konsep belajar dalam pelatihan sejauh ini menganut konsep belajar orang dewasa atau andragogi. Dalam konsep andragogi, Knowles mengutip prinsip belajar orang dewasa menurut Rogers dalam Nugraha (2020, hlm 9-10), diterangkan bahwa orang dewasa bersedia untuk belajar apabila telah memenuhi beberapa prinsip berikut:

- a. Keterlibatan peserta pelatihan dalam proses pembelajaran mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendalam, karena setiap individu hidup dalam dunia pengalamannya yang selalu berubah-ubah, dimana dirinya sendiri adalah sebagai pusat, dan semua orang mereaksi apa yang dia alami dan mengartikan pengalaman itu.
- b. Program belajar ditekankan pada pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta pelatihan. Seseorang akan belajar dengan penuh makna hanya apabila sesuatu yang hendak ia pelajari bisa bermanfaat dalam pengembangan dirinya.

Dan tentunya ia akan mempersoalkan kebiasaan belajar dengan mata pelajaran yang dipaksakan atas dirinya, sehingga seolah-olah dirinya tidak berarti.

- c. Adanya pemberian iklim yang aman, penerimaan, dan saling bantu dengan kepercayaan dan tanggung jawab. Ketika struktur dan organisasi kelihatan kaku, hal tersebut akan melahirkan situasi terancam dan akan melemahkan motivasi belajar mereka.
- d. Di samping perlunya memberikan iklim belajar yang aman bagi pembelajar, juga perlu diakuinya perbedaan persepsi untuk pengembangan otonomi individu dari mereka.

2.1.1.4 Langkah-langkah Penyelenggaraan Diklat

Terdapat banyak model latihan yang dibesarkan oleh para pakar disesuaikan dengan pendekatan, strategi dan modul latihan. Model - model pelatihan tersebut sesungguhnya telah lama dibesarkan, namun hingga kala ini masih senantiasa dipergunakan dan demikian proses serta langkah - langkahnya disesuaikan dengan pertumbuhan keahlian target pelatihan, masalah - masalah yang butuh dipecahkan, kebutuhan kurikulum serta metodologi pelatihan itu sendiri. Didisebutkan dalam Herwina (2021, hlm 9) model latihan yang dibesarkan oleh Louis Genci ini mencakup 4 langkah yang wajib ditempuh dalam penyelenggaraan pelatihan.

a. Langkah Awal (Mengkaji tujuan serta penetapan program latihan)

Aktivitasnya mencakup identifikasi kebutuhan, penentuan tujuan latihan, analisis isi latihan, serta pengorganisasian program latihan. Kebutuhan yang diperlukan dalam pelatihan tentu berkaitan dengan kebutuhan belajarnya, kebutuhan belajar peserta didik adalah untuk menuntaskan kesenjangan kemampuan yang sudah mereka miliki dengan kemampuan yang akan dibutuhkan dalam pekerjaannya. Kemampuan tersebut berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bersangkutan dengan kehidupannya atau untuk dunia kerjanya. Perlu diidentifikasi terlebih dahulu terkait apa kebutuhan warga belajar, dalam hal ini kebutuhan belajar yang diperlukan oleh anggota Satlinmas adalah pengetahuan-pengetahuan dasar tentang wilayah yang akan mereka jaga

keamanan dan ketertibannya, dan juga keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Misalnya, mengetahui letak wilayah setiap kepunduhan yang ada di Desa tersebut, penanggulangan bencana, pengamanan kekacauan yang terjadi di masyarakat, dan lain sebagainya.

b. Langkah Kedua (Merancang tahapan penerapan latihan)

Kegiatannya mencakup penentuan pertemuan - pertemuan resmi serta informal sepanjang latihan (*training sessions*), serta uraian terhadap masalah- masalah pada partisipan latihan. Singkatnya, perencanaan merupakan rangkaian untuk menyiapkan keputusan mengenai apa tujuan yang ingin dicapai, dan apa yang hendak dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Rancangan program yang di konsep dalam pendidikan dan pelatihan Satlinmas ini berbasis bela negara dan tadabur alam, bertempat di Aula Desa dan balai Desa, dan Bukit Nangreu Gunung Galunggung. Warga belajar akan diberikan fasilitas yang bisa menunjang terselenggaranya Diklat dengan baik, seperti jaminan kesehatan, transportasi untuk menuju Bukit nangreu, dan juga seragam beserta atribut secara lengkap sebagai identitas mereka sebagai anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Tawangbanteng, dengan persiapan anggaran yang bersumber dari Anggaran Dana Desa tahun 2022.

c. Langkah Ketiga (Memilah sajian dan pemetaan sumber daya yang efisien)

Kegiatannya mencakup pemilihan serta penentuan jenis-jenis sajian, pengkondisian area tercantum di dalamnya pemakaian fasilitas belajar serta perlengkapan bantu, serta penentuan media komunikasi. Mememetakan sumber daya sesuai kapasitas dengan fungsinya yang akan berperan dalam pelaksanaan guna menjaga kelancaran pelaksanaan. Dimulai dari pamong belajar/penyelenggara kegiatan ini yaitu Pemerintah Desa Tawangbanteng yang bekerja sama dengan SatPol PP, lalu kelompok belajar akan difasilitasi tutor yang akan memberikan materi yaitu dari pihak babinsa, bhabinkamtibnas, koramil, dan juga komunitas yang *expert* dalam hal pengendalian hewan-hewan buas yang biasa masuk ke pemukiman warga. Selain itu, akan ada juga raga belajar yang

diberikan langsung oleh Kepala Desa Tawangbanteng untuk memotivasi para anggota Satuan Linmas dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan ini sampai akhir dan penuh semangat.

d. Langkah Keempat (Melakukan dan mengevaluasi hasil latihan)

Kegiatannya meliputi transformasi pengetahuan, keahlian, serta nilai bersumber pada program latihan, dan penilaian tentang pergantian tingkah laku partisipan sehabis menjajaki program latihan. Tamsuri (2022) Pelaksanaan evaluasi kian menjadi hal yang urgen dan perlu diperhatikan agar keefektifan dan keoptimalan manfaat dari kualitas penyelenggaraan pelatihan dapat diukur keberhasilannya. Kaitannya dengan prestasi peserta diukur secara normatif berdasarkan test yang dilakukan baik melalui post test maupun ujian yang didesain untuk mengukur kemampuan kognitif peserta pelatihan. Sangat sederhana, pada ahirnya makna “keberhasilan” lebih berdasarkan capaian kognitif peserta serta ditunjang kepuasan psikologis selama pelatihan berlangsung. Pada pendidikan dan pelatihan satlinmas yang dilakukan, ada post test yang diberikan kepada warga belajar untuk menilai hasil belajar yang didapatkan selama kegiatan berlangsung.

2.1.1.5 DIKLAT SATLINMAS Sebagai Kegiatan Pendidikan Nonformal

Untuk melaksanakan program-program pada Pendidikan Nonformal, diperlukan komponen-komponen yang akan mendukung pada kelancaran pelaksanaan program. Maka berikut adalah komponen-komponen dasar pada Pendidikan dan Pelatihan Satlinmas yang sesuai dengan 10 patokan Dikmas:

a. Warga Belajar

Warga belajar merupakan individu yang mempunyai kemampuan belajar, jelas kemampuannya dan tergerak hatinya untuk belajar. Warga belajar yang menjadi sasaran pada Diklat Satlinmas ini adalah 38 Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Tawangbanteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya.

b. Sumber Belajar

Sumber belajar merupakan masyarakat yang memiliki ilmu dan kemampuan serta skill yang bersedia dipelajari dan digurui oleh siapa saja yang memerlukannya.

c. Pamong Belajar

Pamong belajar adalah sekelompok orang yang menjamin terselenggaranya proses belajar dengan tertib, teratur dan terarah. Pamong juga dikatakan sebagai pengurus dan penyelenggara proses belajar, mengatur pendayagunaan sumber belajar yang sudah ada dan sudah siap, mengatur program pemagangan, mengusahakan agar setiap sumber belajar tersedia dan suka rela menyumbang pengetahuan kepada masyarakat. Penyelenggara Diklat Satlinmas ini adalah Pemerintah Desa Tawangbanteng Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.

d. Tempat Belajar

Tempat belajar ialah tempat yang memenuhi syarat untuk dapat berfungsi sebagai atau menampung kegiatan belajar warga masyarakat atau warga belajar. Pelaksanaan Diklat Satlinmas ini bertempat di Aula dan Balai Kantor Desa Tawangbanteng, dan Bukit Nangreu Gunung Galunggung.

e. Kelompok Belajar

Kelompok belajar adalah para warga belajar yang menghimpun diri dalam kelompok karena memiliki hasrat belajar, keinginan belajar, dan kemauan belajar yang sama. Kelompok belajar pada penelitian ini adalah Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas).

f. Sarana Belajar

Sarana belajar adalah kelengkapan mutlak yang diperlukan agar rasi belajar dapat berproses.

g. Dana Belajar

Dana belajar adalah barang, uang, dan jasa yang diperlukan untuk menjamin kelestarian atau menjalankan kegiatan belajar yang bermanfaat bagi warga dan masyarakat sekitar. Sumber dana dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Satlinmas ini berasal dari Anggaran Dana Desa tahun 2022.

h. Program Belajar

Program kegiatan belajar ialah serangkaian usaha atau acara belajar yang disusun bersama dalam musyawarah warga belajar. Program yang diusung adalah Pendidikan dan Pelatihan berbasis Bela Negara dan Tadabur Alam.

i. Ragi Belajar

Ragi belajar merupakan suatu zat yang dapat menjadi biang dalam proses belajar yang dapat mendapatkan aneka ragam hasil termasuk menghasilkan ragi baru yang dapat mencetuskan proses belajar lebih lanjut.

j. Hasil Belajar

Hasil belajar ialah wujud nyata dari setiap kegiatan kelompok belajar yang dihindari dan dinikmati bersama oleh warga belajar dan warga masyarakat. Hasil belajar dalam pelaksanaan Diklat Satlinmas ini adalah peningkatan kompetensi kinerja Satlinmas Desa Tawangbanteng Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.

2.1.2 Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)

2.1.2.1 Sejarah Satlinmas

Satlinmas memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka, ini bermula dari salah satu upaya Pemerintahan Belanda waktu itu dalam menghadapi serangan penjajah Jepang yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1939. Upaya yang dilakukan adalah membentuk suatu Organisasi yang ditugaskan melindungi masyarakat dari serangan musuh lewat udara, organisasi tersebut dinamai *Lucht Bescherming Deints* (LBD). Selain menjalankan tugas utama itu, LBD ini juga memiliki tugas dalam banyak hal yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat seperti memadamkan kebakaran, membantu pengungsian, penyamaran dalam penyelamatan, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan tugas-tugas lainnya. Setelah penjajah Jepang berhasil merebut kekuasaan, kedudukan yang sebelumnya dipegang oleh Belanda otomatis tergantikan. Pada tahun 1943 Pemerintah Jepang mendirikan organisasi yang mirip dengan LBD yaitu disebut dengan Pertahanan Sipil (HANSIP), Organisasi ini bertugas pada pertahanan dan pengerahan rakyat secara

total. Selain itu, Hansip juga memiliki tugas dalam menjaga keamanan setempat, mengumpulkan dana, dan juga mengatur distribusi bahan makanan dan lain sebagainya. Hansip dibentuk dari tingkatan pusat sampai ke daerah-daerah bahkan ada di setiap Gumi atau sekarang lumrah disebut RT.

Masuk ke zaman setelah Indonesia Merdeka, pertama kalinya Hansip diatur secara jelas oleh Keputusan Wakil Menteri pertama yang disahkan pada tanggal 19 April 1962 tentang Peraturan Pertahanan Sipil mengatur soal Pertahanan dan Keamanan. Lalu pada tahun 1972, dikeluarkan kembali Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Hansip, berisikan fungsi utama dari Hansip ialah mengorganisir rakyat dan membentuk satuan-satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk menanggulangi atau mengurangi serangan musuh ataupun penanggulangan bencana alam. Dalam Keputusan Presiden tersebut juga diatur Organisasi yang awalnya dibina oleh Departemen Pertahanan Keamanan ini diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan ketatanegaraan dan pertumbuhan angkatan bersenjata di Indonesia, lahirlah ketentuan pokok Pertahanan Negara yang diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 1982 pada tanggal 19 September 1982.

Meskipun tidak melalui Latihan Dasar Militer (LATSARMIL), tugas dan fungsi Hansip ini semakin jelas karena sudah tercantum dalam Undang-undang nomor 20 tahun 1982, dan juga ada dalam Pembinaan Kemendagri. Tupoksi Hansip ini antara lain sebagai pengamanan masyarakat seperti dalam penanggulangan akibat bencana perang ataupun bencana alam. Kemudian pada tahun 2002, Hansip diubah namanya menjadi Perlindungan Masyarakat (LINMAS), tidak banyak yang berubah dengan pergantian nama ini, Linmas juga tetap bertugas pokok dalam hal keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu penanggulangan bencana, melakukan kegiatan sosial di masyarakat, membantu upaya pertahanan, juga terlibat dalam penjagaan keamanan pelaksanaan Pemilu. Lalu pada tahun 2004, Pembinaan terhadap Linmas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibawah Satuan Polisi Pamong Praja

atau akrab kita sebut Satpol PP. Karena disesuaikan dengan isi dari Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/kota, yaitu meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk didalamnya adalah Perlindungan Masyarakat.

2.1.2.2 Definisi Satlinmas

Dalam Permendagri Nomor 26 tahun 2020 pasal 1 menyebutkan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Lalu Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/ kepala desa untuk melaksanakan Linmas. Dan poin (4) menerangkan anggota Satlinmas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.

2.1.2.3 Tugas, Hak, Kewajiban Satlinmas

Tugas Satlinmas diatur pada pasal (27) yang berbunyi satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:

- a. Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
- b. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;

- f. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. Membantu upaya pertahanan negara;
- h. Membantu pengamanan objek vital; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Pasal (28) Adapun hak yang dimiliki anggota sebagai bagian dari Satuan Perlindungan Masyarakat adalah:

- a. Mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. Mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. Mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. Mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati/wali kota serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
- e. Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal (31) Kewajiban yang harus dijalankan sebagai anggota Satlinmas adalah melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat, melaksanakan Janji Satlinmas, dan melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

2.1.2.4 Pemberdayaan Satlinmas

Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa Tawangbanteng berjumlah 38 anggota, perekrutan dilakukan dengan mengambil delegasi dari 6 kependudukan yang ada. Kemudian anggota satlinmas diberikan pembekalan melalui pendidikan dan pelatihan, hal ini merujuk pada pasal 26 Permendagri nomor 26 tahun 2020 yang berbunyi Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas. Di Desa Tawangbanteng, pemberdayaan satlinmas dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berbasis bela negara dan tabung alam. Dilaksanakan selama 3 hari, dari pemberian materi tentang kesatlinmasan hingga praktek materi-materi keamanan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana.

2.1.3 Peningkatan Kapasitas Kinerja

2.1.2.1 Cakupan Kompetensi Kinerja

Nugraha (2020, hlm 12) Sebagaimana dimaklumi bersama, dalam konteks pengembangan sumberdaya manusia, pelatihan selalu digandengkan dengan konsep pengembangan (*training and development*) yang mana pengembangan SDM bermuara pada pengembangan karir. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tawangbanteng ialah Pendidikan dan Pelatihan untuk mengembangkan Sumber Daya pada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat guna meningkatkan Kapasitas Kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa Tawangbanteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Purnomo (2016, hlm 53) mengatakan peningkatan kompetensi dan kapasitas bisa didapat melalui berbagai cara, salah satunya pendidikan dan pelatihan.

Dari Garavan dalam Nugraha (2020, hlm 8) Area dasar yang perlu di tingkatkan pada tiap-tiap konsep baik itu pendidikan, pelatihan, ataupun pengembangan ialah ranah pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*), dengan tetap pada tergetnya yang berkaitan dengan pekerjaan peserta pelatihannya. Kompetensi seorang anggota Satuan Linmas akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya pendidikan dan pelatihan yang diikuti. Kompetensi yang perlu ditingkatkan adalah yang berkaitan dengan kemampuan dan keahlian dalam menjalankan pekerjaan serta akan meningkatkan kompetensi kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS). Kemudian Mumford dalam Nugraha (2020, hlm 21), mengatakan pengembangan yang dilakukan mencakup keterampilan serta wawasan atau pengetahuan faktual yang diperoleh oleh peserta. Mereka jadi tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui sebelumnya (wawasan dan realisasi serta fakta), dan / atau ketika mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan sebelumnya (keterampilan).

2.1.2.2 Komponen pengukuran kinerja

Menurut Indrasari dalam Nisfiah (2022), Kinerja pegawai dapat dikatakan optimal apabila pegawai secara individu mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapan instansi/organisasi. Umar (2005, hlm 102) mengemukakan hakikat penilaian adalah membandingkan fakta realita dengan standar yang ada. Terkait dengan itu, komponen yang bisa dinilai adalah antara lain:

a. Pengetahuan tentang pekerjaan

Dalam hal ini maksudnya tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas yang diemban.

b. Kemampuan kerja sama

Yaitu tingkat kemampuan untuk bisa menjalin hubungan kerja yang baik dengan rekan kerjanya ataupun dengan pihak diluar unitnya.

c. Inisiatif

Inisiatif/prakarsa merupakan bentuk semangat dalam menjalankan tugas-tugas baru dalam memperkental tanggung jawabnya demi kemajuan instansi.

d. Disiplin dan keteraturan kerja

Kegiatan yang dilaksanakan harus selalu mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak menghambat pelaksanaan tugas.

e. Pemanfaatan waktu

Yaitu penyelesaian tugas dengan tingkat waktu yang efektif dan efisien.

f. Tanggung jawab

Merupakan tindakan yang di dasarkan pada niat baik dan benar, serta dengan kesadaran penuh untuk menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Adapun beberapa penelitian serupa yang ditemukan peneliti untuk menjadi bahan referensi dalam penyusunan laporan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian skripsi oleh Geraldo Rival Wokas tahun 2022 dengan judul “Pemberdayaan SATLINMAS dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan

Lingkungan Guna Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban di Kelurahan Ranotana Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menerapkan teori pemberdayaan dari Jim Ife. Dalam penelitian ini, penulisnya menemukan Pemberdayaan Satlinmas dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban di Kelurahan Ranotana sudah berjalan dengan baik melalui penyediaan kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan oleh pemerintah. Namun, terdapat hambatan yang mempengaruhi pemberdayaan Satlinmas yaitu penyediaan Sumber Daya. Dan upaya pemerintah dalam mengatasi gangguan ketenteraman dan ketertiban di Kelurahan Ranotana sudah terlaksana secara baik dengan cara; mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), melakukan penjagaan dan patroli serta melakukan koordinasi dengan Babinsa (TNI) dan Bhabinkamtibmas (POLRI).

- b. Penelitian Skripsi oleh Isnan Rasyidi tahun 2021 berjudul “Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kerinci”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum strategis dengan melakukan penelitian dan wawancara di lapangan. Sifat penelitiannya deskriptif yang dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci belum terlaksana dengan baik. Faktor penghambat untuk mendapatkan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci ini ialah kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014, terbatasnya penyelenggaraan anggaran dana kepada anggota Satlinmas, dan kurangnya pendidikan pelatihan kepada anggota Satlinmas.

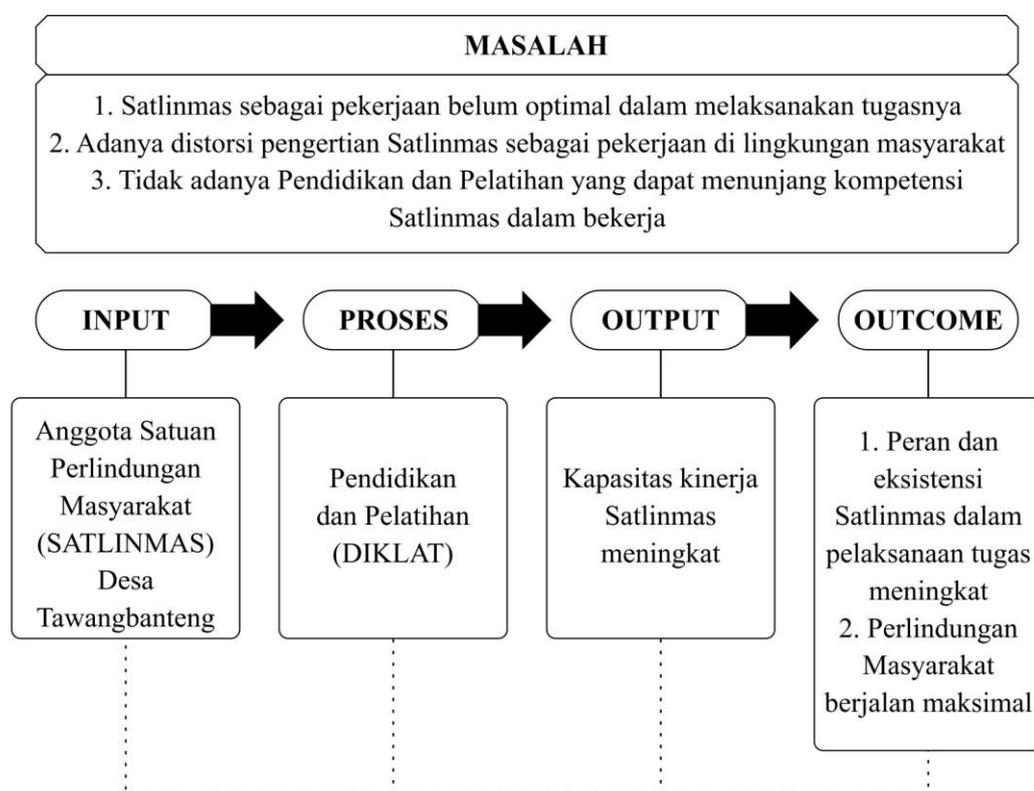
- c. Skripsi oleh Intan Selong tahun 2019 berjudul “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Fokus penelitian pada pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja meliputi analisis sumber dan tingkat serta jenjang pendidikan pegawai. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai.
- d. Skripsi oleh Nanda Ridzky Gumelar tahun 2018 berjudul “Peran Satuan Perlindungan Masyarakat SATLINMAS dalam Perlindungan Masyarakat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2014 di Kabupaten Sleman”. Penelitian ini termasuk penelitian hukum menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian sebagai dasarnya. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 belum dapat sepenuhnya terlaksana di Kabupaten Sleman dikarenakan terbatasnya dana dari Pemerintah Pusat untuk membiayai Satlinmas. Lalu ditemukan faktor pendukung Satlinmas Kabupaten Sleman yaitu Jumlah Personil yang cukup banyak, sedangkan faktor penghambatnya adalah susahnya regenerasi Satlinmas dimana rata-rata peminat Satlinmas adalah Lansia.
- e. Penelitian Jurnal oleh Danang Purnomo, I Putu Sudana, dan I GPB. Sasrawan Mananda tahun 2016 berjudul “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kompetensi Serta Dampaknya Pada Kinerja Pramuwisata Bali”. Penelitian ini menemukan hasil pengaruh positif dari adanya Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kompetensi Pramuwisata Bali, kemudian Kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Pramuwisata Bali, Diklat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pramuwisata Bali secara langsung,

Diklat melalui Kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pramuwisata Bali.

2.3 Kerangka Konseptual

Secara ringkas kerangka pikir penelitian dapat digambarkan adalah sebagai berikut:

Gambar 2 Kerangka Konseptual



Sumber: Peneliti, 2022

2.4 Pertanyaan Penelitian

Diajukan pertanyaan penelitian bagaimana proses pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)?